

DEMOKRASI DI TEPIAN**Menggugat Rezim Jokowi dari Perspektif Teologi Kristen,
“Apa yang Dapat Orang Kristen Lakukan?”****NATHANAEL IVAN PRATAMA**

Universitas Kristen Duta Wacana, Yogyakarta

nael.ivanp@gmail.com

DOI: 10.21460/aradha.2023.41.1314**Abstract**

As Christians, we are called not to remain silent in the face of injustice in the world. This includes looking at the reality that exists in our current context, Indonesia and the issue of democracy in it. This paper uses the contextual theology of praxis model of Stephen B. Bevans to analyze the context of democracy under the regime of President Joko Widodo (Jokowi) in Indonesia. The praxis model invites us not only to understand but also to act. By applying this model, the author invites us to evaluate together how democratic principles are implemented in Jokowi's administration and how a biblical overview of democratic values can provide insight and energy for us as Christians to act. The results of this paper show that the proactive involvement of Christians can actually make a contribution that cannot be underestimated in creating a just government and a prosperous society, in accordance with the principles of democracy that are also contained in the sacred texts of the Bible. The ultimate goal of this paper is to explore what concrete actions Christians can take in the context of democracy in Indonesia. Thus, we can be more effective in carrying out our calling as a light to the world, to Indonesia.

Keywords: democracy, contextual theology, praxis, Bevans, Indonesia.

Abstrak

Sebagai orang Kristen, kita dipanggil untuk tidak berdiam diri dalam menghadapi ketidakadilan di dunia. Termasuk melihat kenyataan yang ada di dalam konteks kita sekarang, Indonesia

dan persoalan demokrasi di dalamnya. Tulisan ini menggunakan teologi kontekstual model praksis dari Stephen B. Bevans untuk menganalisis konteks demokrasi di bawah rezim Presiden Joko Widodo (Jokowi) di Indonesia. Model praksis mengajak kita untuk tidak hanya memahami melainkan juga bertindak. Dengan menerapkan model ini, penulis mengajak untuk mengevaluasi bersama bagaimana prinsip-prinsip demokrasi diimplementasikan dalam pemerintahan Jokowi dan bagaimana tinjauan biblis terhadap nilai-nilai demokrasi dapat memberi wawasan dan energi untuk kita sebagai orang kristen dapat bertindak. Hasil dari tulisan ini menunjukkan bahwa keterlibatan proaktif orang Kristen sebenarnya dapat memberikan kontribusi yang tidak bisa dianggap remeh dalam menciptakan pemerintahan yang adil dan masyarakat yang sejahtera, sesuai dengan prinsip-prinsip berdemokrasi yang juga terkandung dalam teks suci Alkitab. Tujuan akhir dari paper ini adalah untuk mencari tindakan konkret apa yang dapat dilakukan oleh orang Kristen dalam konteks demokrasi di Indonesia. Dengan demikian, kita dapat lebih efektif dalam menjalankan panggilan kita sebagai terang bagi dunia, bagi Indonesia.

Kata-kata kunci: demokrasi, teologi kontekstual, praksis, Bevans, Indonesia.

Pendahuluan

Demokrasi, sebuah konsep pemerintahan yang paling sukses di dunia. Namun kenyataannya beberapa tahun ke belakang mengalami kemunduran. Banyak negara yang menganut sistem pemerintahan demokrasi telah dan sedang terjerumus ke arah Pemerintahan dengan kekuasaan absolut di tangan penguasa (otokrasi), penampilan luarnya *sih* demokrasi yang biasanya dibuktikan dengan pemilu atau “pesta” demokrasi, namun dalamnya tidak ditemukan hak-hak berdemokrasi yang merupakan aspek penting dalam berfungsinya sistem demokrasi.¹ Bagi Indonesia, Demokrasi merupakan buah perjuangan dari jutaan darah yang tumpah untuk tanah air. Ragam peristiwa pada akhirnya berhasil menghantarkan kita pada situasi demokrasi yang diimpikan sejak lama. Namun, 26 tahun pasca-reformasi dan melihat tren demokrasi di dunia yang semakin lemah, masihkah kita dapat menikmati demokrasi?

Pada periode kedua Presiden Ke-7 Republik Indonesia, Joko Widodo (Jokowi) menunjukkan sikap yang berbeda. Meskipun tak sedikit yang berkata bahwa sebenarnya sejak dahulu Jokowi sudah seperti ini, hanya saja saat ini ia menjadi lebih terang-terangan.

¹ “DEMOCRACY,” *The Economist*, accessed June 15, 2024, https://www.economist.com/news/essays/21596796-democracy-was-most-successful-political-idea-20th-century-why-has-it-run-trouble-and-what-can-be-do?utm_medium=cpc.adword.pd&utm_source=google&ppccampaignID=21228634515&ppcadID=&utm_campaign=a.22brand_pmax&utm_content=conversion.direct-response.anonymous&gad_source=1&gclid=Cj0KCQjw97SzBhDaARIsAFHXUWDzyzddKdrleGzLNTDIXb9k8pPN1Zkb28QgfW-rBzZvJB_wMJN8rAcaAh-WvEALw_wcB&gclid=aw.ds.

Pemerintahan Republik Indonesia yang dipimpin oleh Jokowi ini dalam setiap kesempatannya selalu memberikan narasi-narasi yang mengatakan bahwa demokrasi kita sedang baik-baik saja. Tampak sebenarnya di sini bahwa konseptualisasi dari demokrasi berusaha dibawa pada tataran yang paling murahan. Masyarakat dicekoki oleh harapan-harapan palsu, ditambah pada era pasca-kebenaran (*post-truth era*) ini, fakta-fakta obyektif seringkali dibuyarkan yang membuatnya tidak lagi menjadi dasar utama dalam membentuk opini publik atau kebijakan politik.² Apalagi sebuah ironi, bahwa masyarakat Indonesia yang tumbuh atas ketakutan masa lalu bisa digantikan oleh daya tarik emosi yang terbukti nyata atas terpilihnya seorang berrekam jejak merah untuk memimpin Indonesia. Di samping itu, permainan *buzzer* yang begitu masif, pendidikan yang rendah, daya literasi masyarakat yang rendah, memunculkan fenomena *influencer* lebih dipercaya daripada akademisi. Hal semacam ini dapat membuat terhambatnya upaya penegakkan demokrasi di Indonesia. Akibat dari Dinamika perpolitikan nasional ini, Indonesia justru terlihat menampilkan wajah demokrasi yang tercoreng. Demokrasi yang seharusnya dirawat-jaga, nyatanya penuh goresan luka.

Sebagai orang Kristen, kita tidak boleh berdiam diri. Kita memiliki tanggung jawab atas panggilan kita sebagai garam dan terang bagi dunia, terkhusus bagi kita dalam konteks Indonesia, sudah semestinya kita menjadi terang bagi Indonesia. Partisipasi aktif perlu dinyalakan demi memperjuangkan demokrasi. Bila kita hanya berdiam saja tanpa melakukan apapun, kita bukanlah pengikut Kristus. Karena setiap tindakan kita sudah seharusnya mencerminkan kasih Kristus dan kepedulian terhadap sesama, karena itulah yang Ia perbuat. Melalui tulisan ini, kiranya dapat menumbuhkan etos demokrasi orang-orang Kristen dengan berkaca pada permasalahan kebijakan dan tindakan Jokowi sebagai Presiden dan Pemerintahan yang dipimpin olehnya yang dianggap penulis sedang berupaya menghapus cita-cita reformasi 1998, Demokrasi yang sejati.

Demokrasi

Istilah Demokrasi berasal dari bahasa Yunani yang secara sederhana berarti pemerintahan oleh rakyat. Diambil dari kata *demos* yang artinya rakyat dan *kratos* yang berarti pemerintahan.³ Menurut KBBI, Demokrasi diartikan sebagai (1) bentuk atau sistem pemerintahan yang seluruh rakyatnya turut serta memerintah dengan perantaraan wakilnya; pemerintahan rakyat; (2) gagasan atau pandangan hidup yang mengutamakan persamaan hak dan kewajiban serta perlakuan yang sama bagi semua warga negara.⁴

² itsojt, "Post-Truth, Ancaman Serius Bagi Kredibilitas Informasi," *ITS News* (blog), May 23, 2023, <https://www.its.ac.id/news/2023/05/23/post-truth-ancaman-serius-bagi-kredibilitas-informasi/>.

³ Sunarso, *Membedah Demokrasi (Sejarah, Konsep, dan Implementasinya di Indonesia)* (Yogyakarta: UNY Press, 2015), 10.

⁴ "Arti Kata Demokrasi - Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Online," accessed June 2, 2024, <https://kbbi>.

Menurut Jimly Asshiddiqie, Profesor Hukum Tata Negara, Dalam pengertian yang lebih partisipatif demokrasi bahkan disebut sebagai konsep kekuasaan dari, oleh, untuk, dan bersama rakyat. Artinya kekuasaan itu pada pokoknya diakui berasal dari rakyat, dan karena itu rakyatlah yang sebenarnya menentukan dan memberi arah serta yang sesungguhnya menyelenggarakan kehidupan kenegaraan.⁵ Demokrasi memiliki nilai-nilai yang patut untuk dipraktikkan dalam kehidupan, yaitu Penghargaan atas kesamaan; Penghargaan akan partisipasi dalam kehidupan bersama; Penghargaan atas kebebasan; dan Penghargaan atas perbedaan.

Setiap bangsa yang menerapkan sistem demokrasi biasanya memiliki ciri khasnya masing-masing, pun dengan Indonesia. Demokrasi yang dihayati oleh bangsa Indonesia bukan meniru demokrasi dari negara lain, bukan juga ujug-ujug ada begitu saja, melainkan dilahirkan oleh suku-suku bangsa Indonesia sendiri yang terwujud nyata dalam nilai-nilai luhur budaya yang dihidupi. Demokrasi tersebut dinamakan oleh para pendiri bangsa sebagai Demokrasi Pancasila. Hal ini berarti, demokrasi di Indonesia dilaksanakan berlandaskan nilai-nilai Pancasila.⁶

Demokrasi Pancasila memiliki beberapa pengertian—yang disampaikan oleh Mohammad Hatta, Adnan Buyung Nasution, dan Yudi Latif— yang berbunyi demikian⁷:

1. “Demokrasi Pancasila adalah demokrasi yang berdasarkan kekeluargaan dan gotong-royong yang ditujukan kepada kesejahteraan rakyat, yang mengandung unsur-unsur berkesadaran religius, berdasarkan kebenaran, kecintaan dan budi pekerti luhur, berkepribadian Indonesia dan berkesinambungan;”
2. Dalam demokrasi Pancasila, sistem pengorganisasian negara dilakukan oleh rakyat sendiri atau dengan persetujuan rakyat;
3. Dalam demokrasi Pancasila kebebasan individu tidak bersifat mutlak, tetapi harus diselaraskan dengan tanggung jawab sosial. Dalam Demokrasi Pancasila, keuniversalan cita-cita demokrasi dipadukan dengan cita-cita hidup bangsa Indonesia yang dijiwai oleh semangat kekeluargaan, sehingga tidak ada dominasi mayoritas atau minoritas.

Pandangan Para Teolog Mengenai Demokrasi

Tulisan ini menjadi kurang menarik bila pembahasan tidak sampai melihat macam-macam pandangan dari para teolog mengenai demokrasi. Mari kita berangkat dari pendefinisian demokrasi, penulis memakai pandangan dari F. Budi Hardiman di mana Hardiman membedakan

web.id/demokrasi.

⁵ Jimly Asshiddiqie, *Hukum Tata Negara dan Pilar-Pilar Demokrasi* (Jakarta: Konstitusi Press, 2005), 241.

⁶ Tommy Andana et al., eds., *Kajian Akademik: Penegasan Demokrasi Pancasila*, 1st ed. (Jakarta: Badan Pengkajian MPR RI, 2018), 5.

⁷ Andana et al, 6.

demokrasi sebagai sistem dan demokrasi sebagai etos. Demokrasi sebagai sistem hanya dipahami sebagai sebuah sistem pengambilan keputusan publik demi mewujudkan kepentingan umum. Sedangkan etos demokrasi merupakan energi atau mentalitas yang menggerakkan individu untuk menjalankan demokrasi. Dalam hal ini, tidak bisa dibayangkan sebuah demokrasi yang terlepas dari konteks agama dan kebudayaan. Bahkan dua hal tersebutlah yang membantu menciptakan etos demokrasi.⁸ Bila melihat rumusan demokrasi Pancasila yang telah diulas pada bagian sebelumnya, konteks agama nampak sekali melekat pada demokrasi, dibuktikan dengan adanya kata religius yang dimasukkan ke dalam unsur pertama pada poin yang pertama. Dalam Agama Kristen pun demokrasi memiliki hubungan yang berkesinambungan. Menurut Karl Barth, garis Kristen yang mengikuti Injil menunjukkan kecenderungan yang mencolok ke arah apa yang secara umum disebut sebagai negara demokrasi.⁹ Namun, layaknya sistem pemerintahan lain, demokrasi juga memiliki kekurangan-kekurangannya. Menurut Karl Barth: *“... no democracy as such is protected from failing... and degenerating not only into anarchy but also into tyranny and thereby becoming a bad State.”*¹⁰

Maksud Barth adalah tidak ada demokrasi yang kebal dari kemungkinan gagal, demokrasi dalam titik tertentu berpotensi untuk mengalami kegagalan dalam berbagai bidang baik itu dari pemerintahan, penegakkan hukumnya, partisipasi politik, dan lain sebagainya. Bila demokrasi sudah menjadi gagal, tidak hanya berisiko terhadap stabilitas negara, di mana negara berubah menjadi anarki (keadaan tanpa aturan dan ketertiban), namun juga bisa berubah menjadi tirani (pemerintahan yang otoriter dan represif di mana kekuasaan berada di tangan segelintir orang atau satu individu). Akibat dari kegagalan demokrasi tersebut adalah negara—menurut Barth—menjadi “negara yang buruk”. Sebuah negara yang buruk tidak mampu memenuhi fungsi dasar dari *“Good Governance”*, seperti melindungi hak asasi manusia (HAM), menegakkan keadilan, apalagi memastikan kesejahteraan rakyat.

Karl Barth, dalam bukunya tersebut memberikan sebuah peringatan bahwa demokrasi, meskipun merupakan sistem pemerintahan yang diidamkan, dan bisa dikatakan ideal dan relevan hingga saat ini tetap memiliki kerentanan terhadap kegagalan. Demokrasi harus dijaga dan dikelola dengan baik untuk menghindari perubahan menjadi bentuk pemerintahan yang tidak diinginkan seperti anarki atau tirani, yang pada akhirnya akan membuat negara menjadi negara yang buruk.

Di dalam demokrasi, partisipasi semua warga negara sangat diandalkan dalam berbagai aktivitas politik. Menurut Ngelow, terdapat lima prinsip pokok demokrasi yaitu (1)

⁸ Francisco Budi Hardiman, *Demokrasi Dan Sentimentalitas: Dari “Bangsa Setan-Setan”, Radikalisme Agama Sampai Post-Sekularisme* (Depok, Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta, Indonesia: Penerbit PT Kanisius, 2017), 46-47.

⁹ Karl Barth, *Community, State, and Church* (Doubleday, 1960), 181.

¹⁰ Barth, *Community, State, and Church*, 182.

Penghargaan pada setiap individu, (2) Kesetaraan semua orang, (3) Pemerintahan mayoritas dengan hak-hak minoritas, (4) Keharusan berkompromi, dan (5) kebebasan individu.¹¹ Aspek lain yang menjadi penekanan adalah penguatan masyarakat sipil (*civil society*) dalam berhadapan dengan pemerintah dan penguasa. Aspek ini menjadi sangat penting pada tulisan ini, karena relevan dengan kondisi Indonesia saat ini. Kenyataannya, bahwa kita berada pada kondisi ketidakkuatan masyarakat sipil, di sisi lain pemerintah menjadi terlalu dominan dan (bisa) sewenang-wenang, hal ini berakibat pada melemahnya demokrasi.

John Campbell-Nelson dalam tulisannya berpendapat bahwa sesuatu seperti demokrasi adalah bentuk pemerintahan yang sesuai dengan apa yang Yesus ajarkan dan lakukan. Pandangan ini berdasarkan oleh sikap Yesus dalam keempat Injil. Yesus terlihat ingin menjadi pemimpin yang berbeda dari yang lain: Ia menolak pujian masyarakat (Markus 10:18, Lukas 11:27-28, Yohanes 6:15), menolak memutuskan perkara dan malah bertanya “Dan mengapakah engkau juga tidak memutuskan sendiri apa yang benar?” (Lukas 12:57), menolak kepangkatan para murid (Matius 20:22-23), dan ketika Yesus berhadapan dengan pemerintah, Ia tak ragu memberikan peringatan (Matius 20:26, Lukas 22:26).¹²

Teologi Kontekstual

Tidak ada sesuatu yang disebut “teologi” yang ada hanyalah teologi kontekstual. Kira-kira begitu ucapan Bevans dalam membuka bab pertama dalam bukunya berjudul model-model teologi kontekstual. Kontekstualisasi teologi merupakan sebuah upaya untuk memahami iman kita sebagai orang Kristen yang dipandang dari suatu konteks tertentu. Kontekstualisasi merupakan hakikat paling dalam dari teologi itu sendiri.¹³ Selaras dengan itu, Emanuel Gerrit Singgih memandang Teologi Kontekstual sebagai teologi yang bertolak dari realitas konteks di mana seseorang atau gereja berada.¹⁴ Model-model teologi kontekstual—yang ditawarkan Bevans—antara lain model terjemahan, model antropologis, model praksis, model sintesis, model transendental, dan model budaya tandingan. Pertama, model terjemahan yang dalam banyak hal sebenarnya setiap model teologi kontekstual merupakan model ini. Maksudnya adalah selalu ada sebuah isi yang diakomodasi pada sebuah kebudayaan tertentu. Yang membuatnya berbeda adalah bahwa model ini menekankan pewartaan Injil sebagai sebuah pewartaan yang tak berubah. Model ini menerjemahkan bukan melulu kata per kata dan

¹¹ Zakaria J. Ngelow, “Pedoman Pelayanan Gereja di Bidang Politik,” in *Teologi Politik: Panggilan Gereja di Bidang Politik Pascaorde Baru* (Makassar: Yayasan OASE INTIM, 2013), 292.

¹² John Campbell-Nelson, “Demokrasi Sebagai Misi Gereja,” in *Teologi Politik: Panggilan Gereja di Bidang Politik Pascaorde Baru* (Makassar: Yayasan OASE INTIM, 2013), 65.

¹³ Stephen Bevans B., *Model-Model Teologi Kontekstual*, trans. Yosef Maria Florisan (Penerbit Ledalero, 2002).

¹⁴ Emanuel Gerrit Singgih, *Iman dan Politik dalam Era Reformasi* (Jakarta: BPK Gunung Mulia, 2002), 15.

tata bahasa melainkan setiap terjemahan harus menjadi terjemahan atas makna yang baru. Terjemahan yang baik adalah terjemahan yang berhasil menangkap jiwa dari sebuah teks.¹⁵

Model teologi kontekstual kedua adalah model antropologis. Model ini memanfaatkan wawasan ilmu sosial terutama antropologi dalam upaya memahami relasi manusia serta nilai-nilai pembentuk kebudayaan manusia, dan di dalamnya Allah hadir sebagai penawar kehidupan. Jadi, titik fokus model ini terletak pada nilai dan kebaikan pribadi manusia yang mana kebudayaan dipandang sebagai kriteria penilaian yang menyangkut mengenai apakah satu ungkapan kontekstual tertentu dapat dikatakan sejati.¹⁶

Model ketiga adalah model praksis, model ini merupakan cara berteologi yang dianggap “lebih baru”. Model ini biasanya diserupakan dengan teologi pembebasan dan mulai biasa dipakai dalam teologi praktis. Cara berteologi yang lebih baru ini dibentuk oleh pengetahuan pada tingkat yang paling intensif yaitu tingkat aksi berdasarkan refleksi. Model ini memberikan sumbangsih kepada rangkaian perubahan sosial. Ilhamnya tidak berdasarkan teks-teks klasik melainkan dari realita masa kini dan apa peluang yang ada pada masa depan.¹⁷

Model selanjutnya yaitu model keempat adalah model sintesis. Model ini disebut Bevans sebagai model jalan tengah. Model Sintesis berusaha mempertahankan pentingnya pewartaan Injil dan rumusan doktrinal tradisional, pada saat yang sama pula mengakui peran penting yang harus dimainkan konteks dalam teologi. Sebuah tulisan yang memakai model ini dibangun antara sudut pandang budaya penulis dengan sudut pandang budaya orang lain. Dan hal yang paling mendasar adalah bahwa model ini dikembangkan secara dialektis-kreatif yang membuatnya memiliki nama lain yaitu model dialektis. Dan karena model ini mencakup dialog dan pengembangan dari imajinasi analogis, maka bisa juga disebut model dialogis.¹⁸

Model kelima yaitu model transendental dipelopori oleh Immanuel Kant, sebelum akhirnya dikembangkan oleh para pemikir seperti Pierre Rousselot. Model ini menegaskan bahwa tugas merancang sebuah teologi yang kontekstual bukan perihal menghasilkan teks, namun soal perasaan dan nalar dalam subyek yang melampaui dirinya. Jadi, yang terpenting di sini bukanlah apa teologi yang dihasilkan, melainkan sang teolog itu sendiri sebagai subyek penghasil teologi.¹⁹

Model terakhir adalah model budaya tandingan. Sekilas ketika membaca istilah model budaya tandingan ini seakan berarti anti-budaya, padahal tidak demikian. Teologi kontekstual dalam model ini dipraktikkan paling baik melalui analisis atas suatu konteks—dengan tetap

¹⁵ Stephen Bevans B., *Model-Model Teologi Kontekstual*, 64-66.

¹⁶ Stephen Bevans B, 96-98.

¹⁷ Stephen Bevans B, 128.

¹⁸ Stephen Bevans B, 163-164.

¹⁹ Stephen Bevans B, 191-192.

menghargai konteks tersebut. Namun pada saat yang bersamaan, Injil dibiarkan untuk menuntun prosesnya sehingga konteks ini ditata dan dibentuk oleh realitas Injil. Model ini dapat dinamai sebagai model perjumpaan atau keterlibatan karena dinamika model budaya tandingan bukan soal menerjemahkan Injil, mempermudah pemahaman baru dari kebudayaan, menemukan makna baru Injil berdasarkan praksis, melainkan untuk sungguh-sungguh menjumpai serta melibatkan konteks—melalui analisis kritis—dengan sikap hormat dan memaklumkan Injil dalam kata dan perbuatan.²⁰

Teologi Kontekstual Model Praksis

Berdasarkan model-model teologi kontekstual yang sudah dibahas, tulisan ini memakai model praksis. Ide awalnya adalah berangkat dari sebuah keresahan atas konteks demokrasi yang ada di Indonesia. Dalam perjalanannya, penulis merasa bila tulisan ini hanya berhenti sampai tahap memberikan pemahaman baru saja dan menjadi sesuatu yang sekadar “*nice to know*”, tidak terlalu memiliki energi untuk mengubah sesuatu. Oleh sebab itu pada tulisan ini, penulis juga mengajak pembaca untuk turut bertindak dalam menanggapi fenomena demokrasi di Indonesia ini.

Model praksis ini berwawasan utama bukan melulu dengan menyediakan ungkapan-ungkapan yang relevan bagi iman Kristen melainkan lebih dari itu yaitu tentang komitmen kepada tindakan kita sebagai orang Kristen. Teologi di sini dipahami sebagai produk dari dialog berkesinambungan antara aksi dan refleksi. Refleksi dan aksi berputar menjadi satu tiada henti.

Rezim Jokowi

Setelah melihat berbagai macam definisi dan pandangan dari ahli-ahli dan teolog mengenai demokrasi dalam cakupan yang luas. Saatnya bersama kita melihat apa yang sebenarnya terjadi di negara kita, Indonesia. Di satu sisi membuat sebuah klaim bahwa Presiden Joko Widodo (Jokowi) adalah seorang anti-demokrasi tidak sedangkal itu, namun di sisi lain, menyebut pemerintahan berjalan sebagai pemerintahan yang berupaya melemahkan demokrasi, adalah benar. Topik ini tidak secara spontan muncul ke permukaan, namun tren pembahasannya secara bertahap mulai memasuki titik jenuh di masyarakat. Yang ditakutkan adalah apabila masyarakat yang mulai jenuh ini bersikap “*bodo amat*” karena merasa tidak memiliki kekuatan untuk dapat mengubah situasi. Bagaimana tidak, pemerintah mengeluarkan kebijakan demi kebijakan yang muncul bagaikan kedatangan Yesus kedua kali, tiba-tiba. Kebijakan-kebijakan yang ada pun tidak jarang merugikan masyarakat. Berikut adalah sebagian kecil contoh

²⁰ Stephen Bevans B, 221-222.

kebijakan kontroversial pemerintah yang berupaya melemahkan demokrasi dan beberapa sebagai wujud lemahnya demokrasi di Indonesia.

Yang paling hangat akhir-akhir ini dan saat tulisan ini ditulis adalah isu pemblokiran X (dahulu bernama *Twitter*).²¹ X yang menjadi media sosial utama masyarakat dalam berpendapat hendak diblokir oleh pemerintah dengan satu alasan, pornografi. Ketakutan pemerintah tersebut sebenarnya mungkin saja untuk menutupi ketakutan akan kritik dari *netizen*. Banyak kasus-kasus yang mau tidak mau pemerintah dan kepolisian harus repot-repot mengurusnya karena terlanjur viral di X. Sejalan dengan upaya tersebut, muncul pula beberapa hari sebelumnya isu revisi UU Pers. Dua hal krusial dalam revisi ini, yaitu pertama tumpang tindih kewenangan Dewan Pers dengan Komisi Penyiaran Indonesia (KPI), yang kedua adalah munculnya pasal-pasal yang melemahkan fungsi jurnalis khususnya dalam hal investigasi. Ini berpotensi mereduksi peran pers untuk melakukan *check and balances* kinerja pemerintah.²² Kedua hal ini merupakan sebuah upaya pembatasan kebebasan dalam berpendapat.

Masih dalam permasalahan media, revisi Undang-undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) juga mengalami penolakan oleh masyarakat. Revisi Undang-undang ini sangat dapat digunakan untuk menjerat orang-orang yang mengkritik orang lain, bahkan mengkritik pemerintah di media sosial. Penambahan Pasal 45c dalam UU ITE berpotensi untuk disalahgunakan sama seperti pasal karet yang diprotes masyarakat sebelumnya. Namun lagi-lagi, seperti apa dan bagaimanapun masyarakat menyampaikan pendapat dan protes terhadap semua produk hukum yang diproduksi oleh pemerintah, aspirasi tidak pernah didengar. Akhirnya bertambahlah satu lagi alat untuk membungkam kebebasan berpendapat, yaitu UU ITE.

Masalah selanjutnya adalah kekerasan dan kriminalisasi aktivis. Beberapa aktivis, mahasiswa, dan jurnalis telah ditangkap karena mengkritik pemerintah. Kekerasan terhadap aktivis khususnya pembela HAM dan Lingkungan Hidup pada tahun 2023 saja mengalami peningkatan yang signifikan dibandingkan dengan dua tahun sebelumnya.²³ Berbagai bentuk kekerasan telah dialami aktivis, bentuk yang paling ekstrem adalah kematian, seperti yang terjadi di daerah asal penulis, Kalimantan Tengah. Nasib malang dialami seorang aktivis bernama Gijik, warga Desa Bangkal yang menjadi korban tembakan oleh seorang polisi. Gijik tergabung dalam aksi warga Bangkal menuntut realisasi kebun plasma sawit di PT Hamparan

²¹ Mohammad Frizki Pratama, "Kominfo Kian Dekat Bakal Blokir X," *detikjabar*, accessed June 16, 2024, <https://www.detik.com/jabar/berita/d-7392142/kominfo-kian-dekat-bakal-blokir-x>.

²² Wilda Hayatun Nufus, "Dewan Pers Kritik Draf RUU Penyiaran: Memberangus Pers dan Tumpang Tindih," *detiknews*, accessed June 16, 2024, <https://news.detik.com/berita/d-7335754/dewan-pers-kritik-draf-ruu-penyiaran-memberangus-pers-dan-tumpang-tindih>.

²³ Fransiskus Adryanto Pratama, "Kekerasan terhadap Aktivis Lingkungan Meningkat Sepanjang 2023," *tirto.id*, May 13, 2024, <https://tirto.id/kekerasan-terhadap-aktivis-lingkungan-meningkat-sepanjang-2023-gYAd>.

Masawit Bangun Persada (HMBP), di Kabupaten Seruyan, Kalimantan Tengah (Kalteng) pada 7 Oktober 2023 lalu. Mirisnya, Pelaku penembakan hanya divonis 10 bulan kurungan penjara.²⁴ Penggunaan kekuatan aparat yang berlebihan oleh kepolisian (dan mungkin yang lain) ini menimbulkan kritik juga terhadap pemerintah. Mengapa tidak ada langkah keras dari pemerintah sehingga hal kekerasan terhadap demonstrasi mahasiswa dan protes lain terus terjadi dan terjadi.

Permasalahan yang mungkin sudah banyak orang lupa adalah soal pembatasan akses internet tiap kali terdapat demo di suatu daerah seperti Gejayan Memanggil yang mendadak masyarakat sulit sekali mengakses internet pada saat demo berlangsung. Namun, di Papua agak berbeda. Pada tahun 2019, pemerintah Indonesia memutuskan akses internet di Papua dan Papua Barat selama demonstrasi besar-besaran yang berujung ricuh. Alhasil, selama dua pekan, warga di puluhan kabupaten/kota di Papua dan Papua Barat dibuat sulit karena tidak dapat mengakses internet. Meskipun pemerintah berkelit bahwa hal itu dilakukan karena kondisi darurat dan mengancam stabilitas nasional.²⁵

Tak kalah menarik untuk dibahas yaitu persoalan Revisi UU KPK (Komisi Pemberantasan Korupsi). Pada tahun 2019 lalu, pemerintah dan DPR mengesahkan revisi Undang-Undang KPK. UU No.19 tahun 2019 ini dinilai oleh banyak pihak termasuk internal KPK sebagai upaya untuk melemahkan lembaga anti-korupsi Indonesia. Bagaimana tidak, dalam UU tersebut KPK diletakkan sebagai lembaga negara di rumpun eksekutif yang akan mengurangi independensi dan pegawai KPK merupakan Aparatur Sipil Negara (ASN), sehingga sangat besar risiko tidak independennya pengangkatan pegawai saat menjalankan tugasnya di KPK. Selain itu, ayat yang mengatur bahwa pimpinan adalah penanggung jawab tertinggi dihapus, jadi pimpinan KPK bukan lagi penyidik dan penuntut umum. Puncaknya adalah kedudukan dewan pengawas menjadi lebih berkuasa daripada Pimpinan KPK itu sendiri, padahal syarat menjadi pimpinan KPK lebih berat dibanding dewan pengawas. Kewenangan dewan pengawas akhirnya masuk dalam teknis penanganan perkara, di mana di dalamnya mengatur hal pemberian izin penyadapan, penggeledahan dan penyitaan. Padahal standar larangan Etik, dan anti konflik kepentingan untuk dewan pengawas nyatanya lebih rendah dibanding pimpinan dan pegawai KPK.²⁶

²⁴ "Polisi Penembak Mati Gijik Divonis 10 Bulan; Adilkah Menurutmu?," *betahita.id*, accessed June 16, 2024, <https://betahita.id/news/detail/10339/polisi-penembak-mati-gijik-divonis-10-bulan-adilkah-menurutmu-.html?v=1718530124>.

²⁵ "Kronologi Blokir Internet Papua Berujung Vonis untuk Jokowi," *nasional*, accessed June 16, 2024, <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20200603150311-20-509478/kronologi-blokir-internet-papua-berujung-vonis-untuk-jokowi>.

²⁶ Kompas Cyber Media, "UU KPK Hasil Revisi Resmi jadi UU Nomor 19 Tahun 2019," *KOMPAS.com*, October 18, 2019, <https://nasional.kompas.com/read/2019/10/18/11071961/uu-kpk-hasil-revisi-resmi-jadi-uu-nomor-19-tahun-2019>.

Pemindahan Ibukota Negara dari Jakarta ke Kalimantan Timur menimbulkan banyak permasalahan. Terakhir mengenai terusirnya masyarakat asli di daerah IKN, di satu sisi memang benar bahwa keberadaan masyarakat adat secara undang-undang jelas diakui. Namun sampai saat ini di berbagai daerah di Indonesia, masyarakat adat belum sepenuhnya diakui keberadaannya dan bahkan menjadi masyarakat kelas dua. Sejak Republik Indonesia belum merdeka, mereka sudah ada. Dalam hal ini, tercermin pula upaya-upaya membunuh demokrasi melalui nilai kemerdekaan bangsa, dalam hal ini kemerdekaan masyarakat adat yang tinggal di daerah IKN.

Dari segenap permasalahan yang telah sedikit dibahas, pemerintah selalu berkelit bahwa hal-hal tersebut merupakan sesuatu yang harus dilakukan dan demi kesejahteraan, keamanan, dan kemaslahatan seluruh rakyat Indonesia. Padahal nyatanya tidak demikian, yang diuntungkan adalah masyarakat menengah ke atas, rakyat miskin tetaplah miskin, bahkan kebebasan dan kemerdekaannya direnggut demi kaum-kaum elite. Hal ini semakin menguatkan ketakutan dalam sistem demokrasi yang rupa-rupanya benar terjadi, berbagai kebijakan-kebijakan yang dibuat secara buru-buru, tidak mendengarkan suara rakyat, dan hanya sebatas permainan elite, menjadikan negara demokrasi yang katanya berdemokrasi Pancasila, perlahan mulai meninggalkan jati dirinya—atau mungkin kita sebenarnya belum pernah mencapainya— dan mulai beralih menjadi negara otokrasi

Tinjauan Biblis tentang Demokrasi

Bila melihat dalam konteks sejarah, hubungan agama Kristen dan demokrasi—menurut de Gruchy—bersifat ambigu dalam sebagian besar sejarahnya. Bahkan keterkaitan antara iman Kristen dan nilai-nilai demokrasi telah dibahayakan oleh jarak historis gereja terhadap demokrasi.²⁷ Namun, tidak bisa dipungkiri bahwa kekristenan menyediakan rahim yang mengandung apa yang disebut sistem demokrasi. Bila melihat konteks Perjanjian Lama, tidak akan kita dapatkan teks yang secara eksplisit mendefinisikan atau menceritakan tentang demokrasi—selain karena konsep demokrasi baru ada kisaran tahun 500 SM. Hal ini pula yang membuat pandangan umum orang Kristen terbagi menjadi dua, yaitu yang mendukung dan tidak mendukung Demokrasi. Namun, berdasarkan poin-poin mengenai demokrasi secara definitif yang telah dibahas, kita dapat melihat manifestasi demokrasi dalam teks dan cerita yang bernadakan kesetaraan, keadilan, tanggung jawab sosial, dan pelayanan.

Demokrasi sangat menekankan dengan yang namanya kesetaraan sebagai sesama manusia. Selaras dengan itu, Alkitab dalam beberapa teksnya menekankan kesetaraan semua

²⁷ John W. de Gruchy, *Agama Kristen dan Demokrasi: Suatu Teologi Bagi Tata Dunia yang Adil* (Jakarta: BPK Gunung Mulia, 2003), 8-9.

manusia di hadapan Allah. Kesetaraan sudah tercermin melalui ayat yang sangat sering kita baca yaitu Kejadian 1:27 “Maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambar-Nya, menurut gambar Allah diciptakan-Nya dia; laki-laki dan perempuan diciptakan-Nya mereka.” Di samping itu, penulis mengambil salah satu ayat di Perjanjian Baru yaitu Galatia 3:28 yang berbunyi “Dalam hal ini tidak ada orang Yahudi atau orang Yunani, tidak ada hamba atau orang merdeka, tidak ada laki-laki atau perempuan, karena kamu semua adalah satu di dalam Kristus Yesus.”

Bila melihat Kejadian 1:27 tersebut adalah sebuah fakta biblis bahwa kita (manusia) diciptakan setara, manusia merupakan produk yang sama—laki-laki dan perempuan—di mata Allah karena kita diciptakan menurut gambar-Nya. Dalam Perjanjian Baru justru lebih ditegaskan perihal kesetaraan ini. Melalui surat Paulus kepada jemaat di Galilea ini, Paulus tidak meniadakan amanat kebebasan dan kesetaraan sosial, melainkan secara radikal menegaskan bahwa setiap orang adalah setara, satu di dalam Kristus.²⁸ Prinsip kesetaraan dalam Alkitab ini memperjelas ide bahwa setiap manusia memiliki martabat yang sama dan hak yang setara pula dalam proses demokrasi.

Bila dalam konteks demokrasi, pemerintah dituntut untuk berlaku adil terhadap seluruh masyarakat, pemerintah juga harus menjamin hak-hak semua warganya, menghindari korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN) serta menjalankan hukum dengan benar. Prinsip demokrasi yang kedua ini juga dapat kita temukan dalam perjanjian lama, yaitu perihal keadilan. Alkitab pada dasarnya sering menekankan pentingnya keadilan dalam kehidupan sosial, contohnya adalah Mikha 6:8 yang berbunyi demikian “Hai manusia, telah diberitahukan kepadamu apa yang baik. Dan apakah yang dituntut Tuhan daripadamu: selain berlaku adil, mencintai kesetiaan, dan hidup dengan rendah hati di hadapan Allahmu?”. Selaras dengan itu, dalam Yesaya 1:17 juga mengingatkan perihal keadilan, yang berbunyi: “Belajarlah berbuat baik, usahakanlah keadilan, kendalikanlah orang kejam; belalah hak anak-anak yatim, perjuangkanlah perkara janda-janda!”

Demokrasi juga menuntut adanya partisipasi dari orang-orang yang dipimpin serta akuntabilitas dari orang-orang yang dipercaya untuk memimpin. kedua prinsip ini juga dapat ditemukan dalam Alkitab. Amsal 11:14: “Di mana tidak ada pimpinan, bangsa jatuh, tetapi di mana banyak penasihat, ada keselamatan.” dan dalam perjanjian baru yaitu Kisah Para Rasul 6:3: “Karena itu, saudara-saudara, pilihlah tujuh orang di antaramu yang terkenal baik, penuh Roh dan hikmat, supaya kami mengangkat mereka untuk tugas itu.” Prinsip ini mendukung partisipasi aktif masyarakat khususnya orang Kristen dalam politik bernegara dan pentingnya transparansi serta akuntabilitas orang-orang yang memimpin terhadap mereka yang dipimpinnya.

²⁸ John W. de Gruchy, *Agama Kristen dan Demokrasi: Suatu Teologi Bagi Tata Dunia yang Adil* (Jakarta: BPK Gunung Mulia, 2003), 54.

Topik paling mendasar yaitu kebebasan. Kebebasan menjadi konsentrasi tersendiri di Perjanjian Baru, bagaimana tidak, Kristus hadir ke dunia dalam rangka membebaskan kita dari belenggu dosa. Namun, kebebasan di sini bukanlah kebebasan secara umum melainkan kebebasan yang bertanggung jawab. Kebebasan yang bertanggung jawab ini merupakan nilai yang ditekankan dalam Perjanjian Baru. Seperti teks Galatia 5:13 yang berbunyi *"Saudara-saudara, memang kamu telah dipanggil untuk merdeka. Tetapi janganlah kamu mempergunakan kemerdekaan itu sebagai kesempatan untuk kehidupan dalam dosa, melainkan layanilah seorang akan yang lain oleh kasih."* Serta contoh lain yaitu 1 Petrus 2:16: *"Hiduplah sebagai orang merdeka dan bukan seperti mereka yang menyalahgunakan kemerdekaan itu untuk menyelubungi kejahatan-kejahatan mereka, tetapi hiduplah sebagai hamba Allah."* Demokrasi memberikan kebebasan kepada rakyat untuk memilih pemimpinnya dan menyuarakan pendapatnya, namun dari kedua teks tersebut dapat dilihat bahwa sebagai orang Kristen, kebebasan ini harus disertai dengan tanggung jawab moral dan etis.

Pada akhirnya, meskipun Alkitab tidak secara langsung membahas demokrasi modern, melalui tinjauan biblis ini kita dapat melihat dan mengerti mengenai kesetaraan manusia, keadilan, partisipasi, akuntabilitas, kebebasan yang bertanggung jawab ini sangat relevan dengan nilai-nilai demokrasi.

Yang Dapat Kita Lakukan (Sebagai Orang Kristen)

Pertanyaan putus asa yang kerap kali terucap—termasuk dari mulut penulis—adalah apakah teologi kristen dapat memperbaiki praktik demokrasi yang ada? tidak usah jauh-jauh dalam konteks "teologi", apakah orang kristen memiliki kekuatan untuk memperbaiki praktik demokrasi yang ada? Pertanyaan ini menjadi pertanyaan terbuka yang dipandang perlu untuk direfleksikan oleh para pembaca. Namun, seperti yang dibahas oleh Hardiman, mekanisme atau sistem demokrasi ini hanya akan berjalan bila adanya dorongan dari energi demokrasi.²⁹ Energi demokrasi atau etos demokrasi inilah yang bisa kita tumbuhkan dalam upaya mewujudkan sistem demokrasi yang diimpikan. Sehingga pembahasan bagian ini akan menampilkan apa saja yang kita sebagai orang kristen dapat lakukan untuk menambah energi demokrasi.

Orang Kristen harus berpolitik. Dalam pengertian yang paling mendasar, sebenarnya siapapun kita pasti pernah atau sedang berpolitik. Karena selama kita hidup di dunia, kita tidak dapat terlepas dari yang namanya politik. Menurut KBBI, Politik memiliki beberapa arti. Pertama, pengetahuan mengenai ketatanegaraan atau kenegaraan. Kedua, segala urusan dan tindakan (kebijakan, siasat, dan sebagainya) mengenai pemerintahan negara atau terhadap negara lain. Dan ketiga, cara bertindak (dalam menghadapi atau menangani suatu masalah);

²⁹ Hardiman, *Demokrasi Dan Sentimentalitas*, 47.

kebijaksanaan.³⁰ Melihat definisi-definisi KBBI mengenai politik, rupa-rupanya cara kita bertindak dan perihal kebijaksanaan pun merupakan suatu politik. Hal ini pula yang membuat penulis berpikir bahwa setiap aspek di dalam kehidupan kita tak bisa terlepas dari politik. Kita diatur oleh berbagai kebijakan, dan setiap harinya kita membuat keputusan-keputusan (kebijakan) bahkan untuk diri kita sendiri.

Menjadi jelas dan menarik bahwa ketika seseorang berkata “aku tidak berpolitik” sebenarnya ia sudah memiliki suatu sikap yang jelas terhadap politik. Dalam konteks bernegara, orang tersebut sudah—secara sengaja maupun tak sengaja—mengakui status quo, dengan demikian orang tersebut sudah mengorbankan demokrasi, keadilan, dan HAM.³¹ Ini secara tidak langsung penulis artikan sebagai sebuah kritik Singgih terhadap orang Kristen yang tidak berani bersuara apalagi bersikap apatis terhadap politik. Ajakan untuk berpolitik ini bukan dalam arti dangkal yaitu berpolitik praktis, namun paling tidak sebagai orang kristen juga turut mengambil suatu sikap politis. Masalah yang dari dulu hingga sekarang itu-itu saja adalah kondisi di mana banyak orang cepat mendengar, namun lambat dalam merespon, dan gagal dalam bertindak. Mungkin orang kristen yang seperti ini terlalu menghidupi Yakobus 1:19, *hehehe*.

Ketika seorang kristen sudah mengambil suatu sikap politis, akan secara sadar maupun tidak sadar sebenarnya turut menghidupkan kembali suara kenabian. Tentu, bila melihat definisi dalam Alkitab kita sebagai orang kristen bukanlah nabi yang sama dengan Hosea, Yesaya, atau Natan. Kita hanya diutus meneruskan pelayanan “Sang Nabi”, Yesus Kristus (Markus 16:15). Oleh sebab itu, tugas kita bukan mewartakan kehendak Allah yang diwahyukan secara langsung layaknya nabi dalam cerita Alkitab, namun kita dituntut untuk mewartakan sabda Allah yang telah turun kepada para nabi dan “Sang Nabi”, yang secara mudah dapat kita baca dalam Alkitab. Layaknya para nabi, orang Kristen berkewajiban untuk menyatakan suara kenabian ini. Problemanya, suara kenabian ini yang seringkali hilang, baik itu orang Kristen secara individu maupun gereja secara institusi. Suara kenabian adalah wujud protes—bukan dalam arti anarkis, namun minimal memberikan pernyataan tidak setuju—terhadap bentuk-bentuk ketidakadilan. Gereja saat ini—khususnya di daerah penulis, Kalimantan Tengah—sedang kehilangan suara kenabiannya, gereja membisu. Seperti kasus ketidakadilan di Kinipan, kasus Bangkal yang menelan korban, dan kasus-kasus lain—mungkin ada satu-dua gereja yang bersuara, namun kenyataannya mayoritas gereja menutup mata. Suara pendeta di gereja dalam khotbahnya hanya sebatas “mari kita berdoa untuk...” bukan “mari kita bersama menyatakan sikap terhadap...” Suara kenabian di sini tidak melulu dipahami sebagai seruan terhadap

³⁰ “Arti Kata Politik - Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Online,” accessed June 18, 2024, <https://kbbi.web.id/politik>.

³¹ Singgih, *Iman dan Politik dalam Era Reformasi*, 27.

orang kristen. Penulis menyitir Singgih dalam salah satu bukunya: *“Sebagai orang kristen kita harus belajar membangun kepekaan terhadap penderitaan rakyat, dan bukan hanya sensitif terhadap warga gereja saja.”*³² Maksudnya, meskipun orang kristen di Indonesia merupakan minoritas, bukan menjadi alasan kita untuk tidak menyuarakan suara kenabian terhadap kasus-kasus yang bukan menyangkut kehidupan orang kristen. *“Karena itu, selama masih ada kesempatan bagi kita, marilah kita berbuat baik kepada semua orang, tetapi terutama kepada kawan-kawan kita seiman.”* (Galatia 6:10).

Dalam semangat restorasi demokrasi di Indonesia ini, kita telah membahas mengenai apa saja yang menjadi peluang bagi orang kristen sebagai “yang dipimpin” untuk dapat berkontribusi dalam permasalahan ini. Namun, tidak lupa bahwa banyak juga orang-orang penting (pejabat pemerintahan) yang merupakan orang kristen yang mana menjalankan kehidupannya sebagai “yang memimpin”. Sebut saja contohnya Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Indonesia, Luhut Binsar Pandjaitan. Telah disinggung oleh Ngelow bahwa Aspek penting yang menjadi penekanan adalah penguatan masyarakat sipil (*civil society*) terutama dalam berhadapan dengan pemerintah dan penguasa. Yang mana dalam hal ini masyarakat sipil adalah orang “yang dipimpin”, kita harus berpartisipasi aktif, dan sebagai “yang memimpin” kita perlu memiliki prinsip akuntabilitas. Sebagai orang kristen yang dipercaya memimpin, sudah seharusnya memiliki tanggung jawab moral yang lebih besar dari yang dipimpin. Meskipun pada kenyataannya tidak sedikit orang-orang kristen yang melakukan praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN). Bahkan kita sebagai orang-orang yang dipimpin pun secara sadar dan tidak sadar pasti pernah melakukan itu. Meskipun budaya Indonesia satu ini tidak bersifat agamais, namun tulisan ini hendak mengingatkan para pemimpin khususnya yang beragama kristen.

Terakhir, menyitir perkataan Denni H.R Pinontoan, sikap teologis gereja—dalam konteks umat maupun institusi—terhadap politik itu bersifat dinamis, tidak kaku apalagi status quo. Di satu pihak ikut terlibat dalam politik bernegara, di sisi lain tetap harus diimbangi dengan kewaspadaan.³³ Jadi, orang Kristen harus kritis dan memiliki hikmat dalam berteologi dalam konteks politik dan berdemokrasi. Penulis sepakat dengan Singgih yang mengingatkan bahwa ketika orang Kristen terlalu bergantung pada negara dan pemerintah, terutama jika mereka cenderung mendukung setiap kebijakan tanpa kritis, hal ini dapat mengarah pada pengembangan teologi kontekstual yang mendukung status quo.³⁴ Ketergantungan berlebihan ini dapat membuat orang Kristen kehilangan semangat kritis yang diperlukan

³² Singgih, 21.

³³ Denni H.R. Pinontoan, “Minahasa Hari Ini: Antara Politik Otonomi Daerah, Gereja, dan Identitas,” in *Teologi Politik: Panggilan Gereja di Bidang Politik Pascaorde Baru* (Makassar: Yayasan OASE INTIM, 2013), 269.

³⁴ Singgih, *Iman dan Politik dalam Era Reformasi*, 15.

untuk mengevaluasi kebijakan-kebijakan pemerintah secara objektif dan independen apalagi sesuai dengan nilai-nilai Kristiani. Ketika orang Kristen mendukung setiap kebijakan pemerintah tanpa mempertanyakan keadilannya atau dampaknya terhadap masyarakat, terdapat risiko bahwa kita akan mengabaikan panggilan moral kita sebagai pengikut Kristus untuk memperjuangkan keadilan dan kebenaran. Dukungan tanpa kritik ini dapat membuat orang Kristen pasif dan menerima mentah-mentah apa saja yang diberikan oleh pemerintah. Akibatnya, saat kita berteologi kontekstual, buah yang dikembangkan dalam kondisi ini cenderung mendukung dan mempertahankan status quo, daripada menjadi alat untuk transformasi sosial yang sejati sesuai dengan iman kepada Yesus Kristus. Ketika kita secara aktif dan bijaksana mengikuti nasihat Singgih tersebut, kita telah berkontribusi pada terciptanya demokrasi yang kuat. *“... Demokrasi yang kuat akan menciptakan keseimbangan antara masyarakat dan negara, di mana interaksi kasih (love), kuasa (power), dan keadilan (justice) akan terjadi.”*³⁵

Penutup

Dengan demikian, telah sampai kita pada penghujung pembahasan. Tetaplah miliki pengharapan di tengah gempuran ketidakadilan yang terjadi di negara kita, Indonesia. Pengharapan terhadap demokrasi yang membaik di Indonesia perlu senantiasa dinyalakan terangnya. Demokrasi yang kuat dan adil—sebagaimana kita impikan—tidak hanya bergantung pada sistem pemerintahan yang ada, tetapi juga pada etos demokrasi yang dirawat melalui partisipasi aktif dan kritis dari setiap warga masyarakat Indonesia, termasuk orang-orang Kristen. Namun, bila pengharapan itu mulai pudar, mari sadari bahwa saudara/saudari tidak sendiri. Dalam perjalanan yang penuh tantangan ini, kita harus terus mengingat panggilan kita sebagai pengikut Kristus untuk menjadi agen perubahan dan pembawa terang. Mari kita bersama menunjukkan nyala terang kita, mengedepankan kasih, keadilan, dan kebenaran dalam setiap aspek kehidupan. Dengan demikian, kita dapat menjadi terang bagi Indonesia, berkontribusi pada terciptanya masyarakat yang lebih adil serta menginspirasi orang-orang di sekeliling kita untuk turut serta dalam upaya memperbaiki dan memperkuat demokrasi di negeri ini. Semoga komitmen kita untuk berbuat baik dan bertindak benar—terlepas dari segala tantangan—dapat membawa perubahan positif dan menjadi cerminan nyata dari kasih Kristus di tengah dunia yang membutuhkan harapan.

³⁵ Julianus Mojau, “Wacana Pluralitas dan Demokrasi dalam Pemikiran Teologis Kontemporer Protestanisme Indonesia (Sebuah Telaah Kritis),” in *Teks dan Konteks Berteologi Lintas Budaya*, 1st ed. (Jakarta: BPK Gunung Mulia, 2019), 226.

Daftar Pustaka

- Andana, Tommy, Siti Aminah, Otto T. Setiawan, and Pradita D. Dukarno, eds. *Kajian Akademik: Penegasan Demokrasi Pancasila*. 1st ed. Jakarta: Badan Pengkajian MPR RI, 2018.
- “Arti Kata Demokrasi - Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Online.” Accessed June 2, 2024. <https://kbbi.web.id/demokrasi>.
- “Arti Kata Politik - Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Online.” Accessed June 18, 2024. <https://kbbi.web.id/politik>.
- Asshiddiqie, Jimly. *Hukum Tata Negara dan Pilar-Pilar Demokrasi*. Jakarta: Konstitusi Press, 2005.
- Barth, Karl. *Community, State, and Church*. New York: Doubleday, 1960.
- betahita.id. “Polisi Penembak Mati Gijik Divonis 10 Bulan; Adilkah Menurutmu?” Accessed June 16, 2024. <https://betahita.id/news/detail/10339/polisi-penembak-mati-gijik-divonis-10-bulan-adilkah-menurutmu-.html?v=1718530124>.
- Campbell-Nelson, John. “Demokrasi Sebagai Misi Gereja.” In *Teologi Politik: Panggilan Gereja di Bidang Politik Pascaorde Baru*. Makassar: Yayasan OASE INTIM, 2013.
- Gruchy, John W. de. *Agama Kristen dan Demokrasi: Suatu Teologi Bagi Tata Dunia yang Adil*. Jakarta: BPK Gunung Mulia, 2003.
- Hardiman, Francisco Budi. *Demokrasi dan Sentimentalitas: Dari “Bangsa Setan-Setan”, Radikalisme Agama Sampai Post-Sekularisme*. Yogyakarta: Penerbit PT Kanisius, 2017.
- itsojt. “Post-Truth, Ancaman Serius Bagi Kredibilitas Informasi.” *ITS News* (blog), May 23, 2023. <https://www.its.ac.id/news/2023/05/23/post-truth-ancaman-serius-bagi-kredibilitas-informasi/>.
- Media, Kompas Cyber. “UU KPK Hasil Revisi Resmi jadi UU Nomor 19 Tahun 2019.” *KOMPAS.com*, October 18, 2019. <https://nasional.kompas.com/read/2019/10/18/11071961/uu-kpk-hasil-revisi-resmi-jadi-uu-nomor-19-tahun-2019>.
- Mojau, Julianus. “Wacana Pluralitas dan Demokrasi dalam Pemikiran Teologis Kontemporer Protestanisme Indonesia (Sebuah Telaah Kritis).” In *Teks dan Konteks Berteologi Lintas Budaya*, 1st ed. Jakarta: BPK Gunung Mulia, 2019.
- nasional. “Kronologi Blokir Internet Papua Berujung Vonis untuk Jokowi.” Accessed June 16, 2024. <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20200603150311-20-509478/kronologi-blokir-internet-papua-berujung-vonis-untuk-jokowi>.
- Ngelow, Zakaria J. “Pedoman Pelayanan Gereja di Bidang Politik.” In *Teologi Politik: Panggilan Gereja di Bidang Politik Pascaorde Baru*. Makassar: Yayasan OASE INTIM, 2013.

- Nufus, Wilda Hayatun. "Dewan Pers Kritik Draft RUU Penyiaran: Memberangus Pers dan Tumpang Tindih." *detiknews*. Accessed June 16, 2024. <https://news.detik.com/berita/d-7335754/dewan-pers-kritik-draf-ruu-penyiaran-memberangus-pers-dan-tumpang-tindih>.
- Pinontoan, Denni H. R. "Minahasa Hari Ini: Antara Politik Otonomi Daerah, Gereja, dan Identitas." In *Teologi Politik: Panggilan Gereja di Bidang Politik Pascaorde Baru*. Makassar: Yayasan OASE INTIM, 2013.
- Pratama, Fransiskus Adryanto. "Kekerasan terhadap Aktivis Lingkungan Meningkat Sepanjang 2023." *tirto.id*, May 13, 2024. <https://tirto.id/kekerasan-terhadap-aktivis-lingkungan-meningkat-sepanjang-2023-gYAd>.
- Pratama, Mohammad Frizki. "Kominfo Kian Dekat Bakal Blokir X." *detikjabar*. Accessed June 16, 2024. <https://www.detik.com/jabar/berita/d-7392142/kominfo-kian-dekat-bakal-blokir-x>.
- Singgih, Emanuel Gerrit. *Iman dan Politik dalam Era Reformasi*. Jakarta: BPK Gunung Mulia, 2002.
- Stephen Bevans B. *Model-Model Teologi Kontekstual*. Translated by Yosef Maria Florisan. Penerbit Ledalero, 2002.
- Sunarso. *Membedah Demokrasi: Sejarah, Konsep, dan Implementasinya di Indonesia*. Yogyakarta: UNY Press, 2015.
- The Economist. "DEMOCRACY." Accessed June 15, 2024. https://www.economist.com/news/essays/21596796-democracy-was-most-successful-political-idea-20th-century-why-has-it-run-trouble-and-what-can-be-do?utm_medium=cpc.adword.pd&utm_source=google&ppccampaignID=21228634515&ppcadID=&utm_campaign=a.22brand_pmax&utm_content=conversion.direct-response.anonymous&gad_source=1&gclid=Cj0KCQjw97SzBhDaARIsAFHXUWDzyzddKdrleGzLNTDIXb9k8pPN1Zkb28QgfW-rBzZvJB_wMJN8rAcaAhWvEALw_wcB&gclid=aw.ds.